

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU
NAPANGGA TANJUNG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**FAUZAN ANSHORY
NPM : 157310681**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

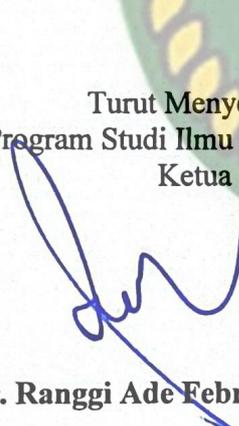
Nama : Fauzan Anshory
NPM : 157310681
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, Desember 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fauzan Anshory
NPM : 157310681
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 27 Januari 2022

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA



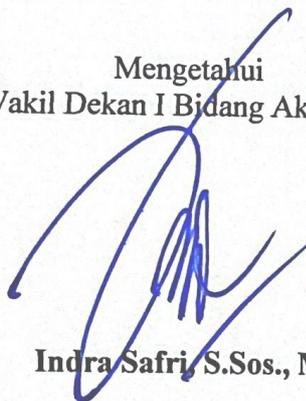
Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0031 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fauzan Anshory
N P M : 157310681
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan dalam Mengembangkan objek Wisata Danau Napangga Kabupaten Rokan Hilir.**

Struktur Tim :

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Data Wardana, S.Sos.,M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Yendri Nazir, S.Sos., M.SI	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos.,M.SI	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

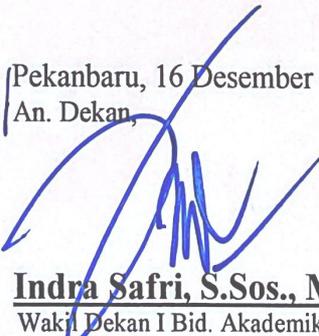
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 001/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fauzan Anshory
NPM : 157310681
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan dalam Mengembangkan Objek Wisata Danau Napangga Kabupaten Rokan Hilir.**

Nilai Ujian : Angka : " 77.66 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 Desember 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fauzan Anshory
NPM : 157310681
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

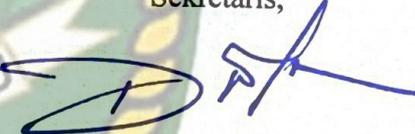
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 27 Januari 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

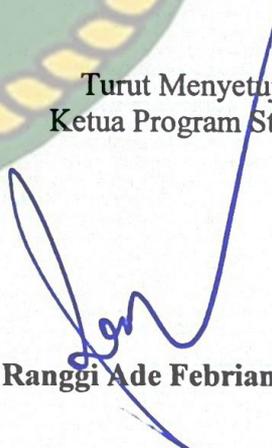

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan sarana prasarana perkuliahan.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yang telah bersedia memberikan data awal dan meluangkan waktu untuk pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Penghulu Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan Kelompok Sadarwisata Objek Wisata Danau Napangga yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi ini.

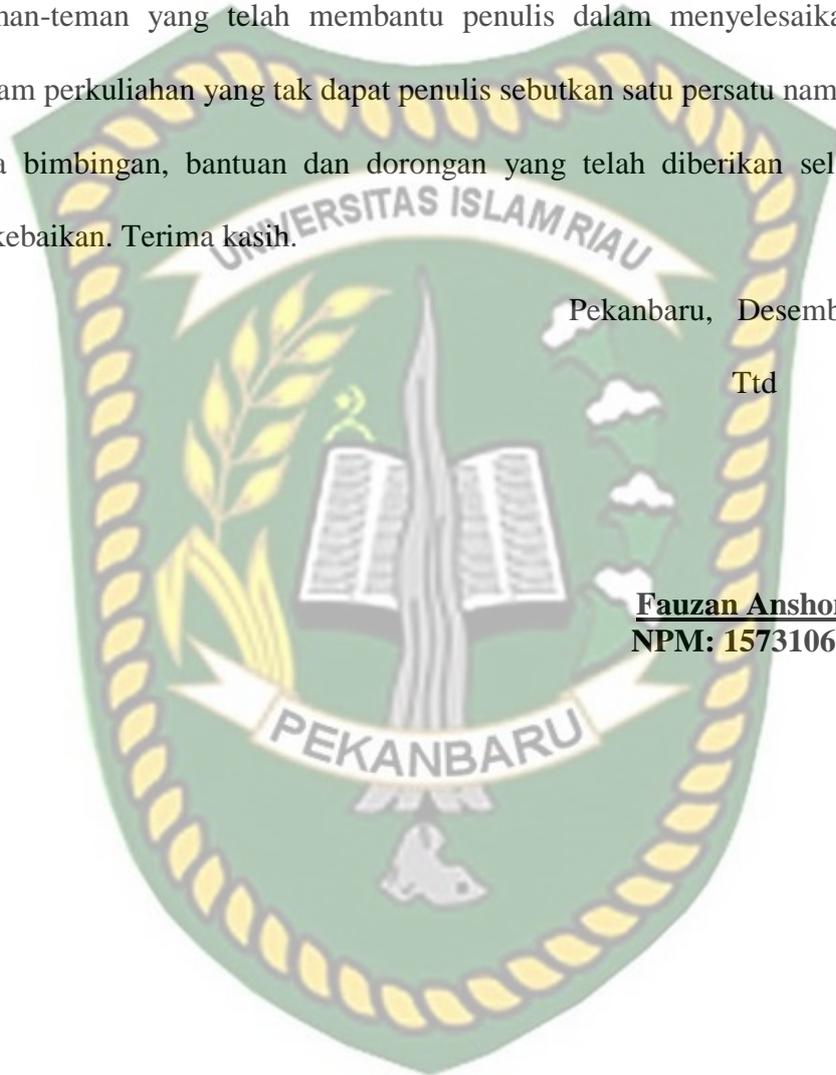
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2021

Ttd

Fauzan Anshory
NPM: 157310681

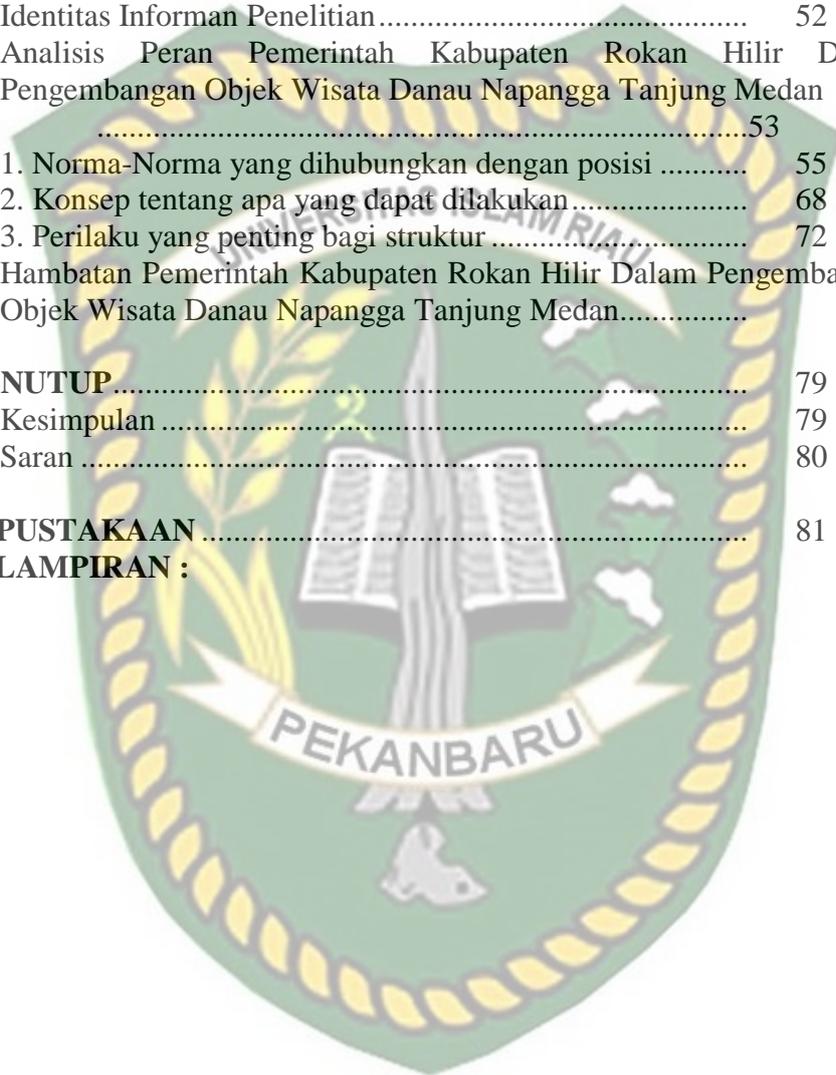


DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Pengertian Pemerintahan	13
2. Konsep Pemerintahan Daerah	14
3. Konsep Otonomi Daerah	16
4. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	17
5. Tujuan Otonomi Daerah	19
6. Manajemen Pemerintahan	19
7. Teori Peranan	20
8. Pengembangan Kepariwisata	23
9. Konsep Wisata	25
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikiran	33
D. Konsep Operasional	34
E. Operasionalisasi Variabel	36
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian	38
D. Teknik Perancangan dan Penetapan Informan	39
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Instrumen Penelitian	41
H. Uji Validitas Data	42
I. Teknik Analisis Data	43
J. Jadwal Waktu Penelitian	46

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	47
A. Sejarah Singkat Kepenghuluan Tanjung Medan.....	47
B. Keadaan Geografis Kepenghuluan Tanjung Medan	47
C. Keadaan Kependudukan Kepenghuluan Tanjung Medan...	48
D. Gambaran Danau Napangga	50
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Identitas Informan Penelitian.....	52
B. Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan	53
1. Norma-Norma yang dihubungkan dengan posisi	55
2. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan	68
3. Perilaku yang penting bagi struktur	72
C. Hambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.....	77
BAB VI : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Kegiatan Promosi Danau Napangga	7
II.1	Penelitian Terdahulu	30
II.2	Operasional Variabel Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan	36
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan	46
IV.1	Jumlah Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan	48
IV.2	Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga	49
IV.3	Sarana Pendidikan yang ada di Kepenghuluan Tanjung Medan	49
V.1	Identitas Informan Penelitian	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan	34
III.1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif	43
IV.1	Plang Danau Napangga.....	51
V.1	Promosi Danau Napangga Melalui Media Sosial Instagram dan Facebook	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan
2. Jawaban Pertanyaan Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzan Anshory
NPM : 157310681
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021
Pelaku Pernyataan,



Fauzan Anshory
NPM: 157310681

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU NAPANGGA TANJUNG MEDAN

ABSTRAK

oleh
Fauzan Anshory
NPM: 157310681

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kabupaten, Objek Wisata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk menjawab permasalahan ditetapkan informan utama dan informan tambahan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dari seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, *Pertama* peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan secara keseluruhan telah cukup berperan. Di mana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan kawasan objek wisata Danau Napangga sebagai salah satu aset pemerintah, dibentuk kelompok masyarakat yang konsen terhadap bidang pariwisata yakni Pokdarwis Napangga. Kemudian pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah membangun beberapa jenis bangunan seperti jalan menuju danau, rumah rimba, dan tempat-tempat swafoto. Adanya jalinan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kepenghuluan Tanjung Medan, sehingga terwujudnya salah satu agenda tahunan berupa even Danau Napangga. *Kedua*, adanya hambatan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga yakni terbatasnya alokasi anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata untuk pengembangan objek wisata, kurangnya inovasi Pokdarwis yang telah dibentuk pemerintah kepenghuluan dalam mengembangkan objek wisata, kurangnya promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan dan mengingatkan masyarakat akan keberadaan Danau Napangga.

ROKAN HILIR REGENCY GOVERNMENT ROLE IN THE DEVELOPMENT OF
LAKE NAPANGGA TOURISM OBJECT TANJUNG MEDAN

ABSTRACT

by

Fauzan Anshory
NPM: 157310681

Keywords: Role, Regency Government, Tourism Object
This study aims to determine the role and obstacles of the Government of Rokan Hilir Regency in the Development of Lake Napangga Tanjung Medan Tourism Object. The type of research used is a qualitative method with a descriptive approach. To answer the problem, the main informants and additional informants were determined. The data collected in this research is through field studies, namely by conducting interviews, observation and documentation. Then from all the data collected, it is classified according to its type and form and then presented descriptively. Based on the results of the study, firstly, the role of the Rokan Hilir Regency Government in the Development of Lake Napangga Tanjung Medan Tourism Object as a whole has played a significant role. Where the Rokan Hilir Regency Government has determined the Lake Napangga tourist attraction area as one of the government's assets, a community group that is concerned with the tourism sector is Pokdarwis Napangga. Then the government of Rokan Hilir Regency has built several types of buildings such as roads leading to the lake, jungle houses, and selfie spots. The existence of a network of cooperation between the government of Rokan Hilir Regency and the Head of Tanjung Medan, so that one of the annual agendas is realized in the form of the Lake Napangga event. Second, there are obstacles to the Rokan Hilir Regency government in developing Lake Napangga tourism objects, namely the limited budget allocation owned by the Tourism Office for tourism development, the lack of Pokdarwis innovation that has been formed by the Penghuluan government in developing tourism objects, the lack of promotions carried out in introducing and reminding the public about the existence of Lake Napangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang dikatakan : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....."

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara bertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki Kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana amanat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;**
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di daerah dimana point ketentraman dan kenyamanan lingkungan sekitar yang berdampak gangguan terhadap kenyamanan kehidupan bermasyarakat disekitarnya.

Penyelenggaraan penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui

peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai obyek wisata yang menarik dan cukup potensial untuk dikembangkan. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari obyek wisata alam yaitu: Pulau Jemur, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik, Pulau Sarang Elang, Pulau Batu Mandi dan Pulau Batu Berlayar, Kota di atas Laut (Panipahan), Pulau Halang, **Danau Napangga**, Bono Sungai Rokan dan Pulau Tilan. Sedangkan obyek wisata budaya dan sejarah yaitu: Batu Belah Batu Betangkup, Bakar Tongkang, dan Desa Rantau Bais.

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang perlu dikembangkan, dikelola dalam pembangunan karena pariwisata merupakan salah satu sumber devisa Negara yang sangat potensial dalam membangun perekonomian Negara. Selain itu pariwisata juga dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf kehidupan, bahkan mempererat persaudaraan antar bangsa dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada Negara lain.

Menurut Wahab (2003:5) Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam Negara penerima wisatawan. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran. Upaya

pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan Kabupaten dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari Pemerintah dan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan bidang pariwisata yang menjadi urusan pilihan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Maka urusan ini bisa juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten dengan melimpahkan kewenangan kepada Dinas Pariwisata yang bertugas menjalankan bidang pariwisata.

Danau Napangga adalah Danau yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan. Kata Danau Napangga diambil dari hasil rapat oleh 7 Raja yang dipimpin langsung oleh Sultan Siak Sri Indra Pura. Yang mana (6) enam Raja lainnya yaitu:

1. Raja Kota Pinang
2. Raja Negeri Lama
3. Raja Semangambat
4. Raja Dalu-Dalu
5. Raja Rambah
6. Raja Kepenuhan

Kata Danau Napangga sendiri awalnya bernama Laut Danau Napangga, yang memiliki arti tersendiri. Laut artinya tempatan karena danau tersebut luas, Danau artinya Danau berdasarkan bahasa Nasional, sedangkan Napangga diambil dari bahasa Mandailing yang artinya Rawa Kering. Namun setelah disepakati oleh

para Raja-raja yang hadir pada waktu itu maka, Laut Danau Napangga yang terdahulu diganti dengan nama Danau Napangga yang sekarang menjadi ikon Kepenghuluan Tanjung Medan yang kemudian telah menjadi asset wisata Kabupaten Rokan Hilir.

Di Danau Napangga juga hidup ratusan jenis ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan. Danau Napangga yang sampai sekarang masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bergantung hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Danau Napangga tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Danau Napangga yang dikenal dengan banyak kekayaan alam yang melimpah, kini mulai mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia yang melakukan penebangan pohon dan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. hal ini juga membuat perkembangbiakan ikan yang hidup di Danau Napangga terancam punah karena tidak adanya lagi Hutan Rawa di sekitar danau.

Objek wisata Danau Napangga menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga setiap tahunnya selalu dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Tabel I.1 Kegiatan Promosi Danau Napangga

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Festival Danau Napangga	Oktober – November
2	Penangkapan Ikan	Setiap akhir pekan
3	Berkeliling dengan sampan motor	Setiap akhir pekan

Sumber: Pokdarwis Danau Napangga, 2020.

Dengan demikian berbagai aktivitas terus dilaksanakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan Danau Napangga dan menggelar berbagai kegiatan menarik, agar pengunjung terus berdatangan ke objek wisata ini. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata setiap tahunnya mengadakan festival Danau Napangga dan didukung dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Danau Napangga.

Adanya berbagai kegiatan promosi wisata dan pengelola wisata Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan tentunya menjadi satu kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kepenghuluan dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui objek wisata.

Untuk mendukung objek wisata Danau Napangga, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata bersama kelompok masyarakat sadar wisata melaksanakan beberapa program pengembangan wisata. Di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 lalu sudah membentuk Kelompok Sadar Wisata Danau Napangga sebagai kelompok masyarakat yang ditetapkan mengelola objek wisata tersebut. Sementara dalam mendukung program pengembangannya pemerintah Kepenghuluan pada tahun 2019 melakukan penimbunan bantaran dermaga Danau Napangga sepanjang 15 meter dengan menggunakan dana ADD sebesar Rp. 150.000.000,- Kontribusi lain pemerintah Kepenghuluan dalam pengembangan objek wisata adalah mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengembangkan objek wisata tersebut dengan mengadakan berbagai even dan pembangunan. Namun sampai saat ini pengembangannya baru terlaksana berupa

pembentukan kelompok sadar wisata, pengusulan even atau kegiatan promosi, dan penimbunan dermaga.

Pengembangan objek Danau Napangga belum bisa dilakukan secara mandiri oleh kelompok sadar wisata dan belum berkontribusi pada Pendapatan Daerah. Dikarenakan dalam satu tahun pendapatan dari tiket masuk tidak melebihi Rp. 50.000.000,-, sehingga dana dari tiket masuk hanya habis digunakan untuk operasional kelompok sadar wisata dan perbaikan kecil. Hal ini tentu menjadi suatu kendala yang harus diperhatikan semua kalangan yang bergelut di objek wisata Danau Napangga, agar objek ini bisa berkontribusi lebih bagi pengembangan objek wisata maupun terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Permasalahan yang sudah dipaparkan di atas baik dari segi objek wisata maupun dari segi pemerintah daerah merupakan alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata yang ada. Dikarenakan objek wisata bisa dikembangkan dan dikelola secara baik sebagai salah satu sumber untuk memperoleh tambahan penghasilan bagi daerah dan penghasilan ini bisa dijadikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh gejala-gejala sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa objek wisata Danau Napangga dikelola oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata dengan fasilitas dan sarana prasarana yang ada dibangun secara swadaya oleh kelompok

masyarakat dan hanya ada bantuan dari pemerintah kepenghuluuan berupa penimbunan serta usulan pengembangan ke pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, seluruh pendapatan atas pengelolaan objek wisata tersebut yang berasal dari tiket masuk, parkir semuanya menjadi pemasukan bagi kelompok masyarakat tanpa ada dana yang masuk ke kas daerah, dikarenakan habis untuk operasional pengelola. Padahal setiap tahunnya diadakan kegiatan di Danau Napangga oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Terindikasi salah satu objek wisata yang pantas dikembangkan, namun perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata sangat kecil yakni hanya pembangunan sebagian jalan menuju objek wisata dan dalam bentuk even tahunan.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan”**

B. Perumusan Masalah

Dari fenomena dan gejala-gejala sebagaimana telah dipaparkan, maka penulis dapat menemukan suatu rumusan masalah yakni Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis, praktis maupun manfaat kontributif.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya pengembangan objek wisata, sehingga terciptanya pengelolaan pariwisata yang baik.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pengembangan pariwisata.

c. Manfaat Kontributif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Pemerintahan

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti “*Act, fact, manner, of governing*”, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Governance* merupakan suatu proses atau kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Munaf (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Sedangkan menurut Syafiie (2014:12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoha, 1995 : 101).

Fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- 1). Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- 2). Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha, 2011 : 85).

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:17) adalah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya”⁴ dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi :

1) Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Tugas pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dijelaskan oleh Syafiie (2009:110) sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa di mana pemerintahan daerah mempunyai wewenang dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi.

3. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya

sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2007:5).

5. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

6. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat

pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.
2. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan.

Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

7. Teori Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh

karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2001:148) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah peran selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana dari kegiatan pembangunan. Dengan demikian pada penelitian ini peneliti hanya membatasi peran dari pemerintah dalam pembangunan yakni :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

Sementara menurut Ndraha (1987:253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Menurut Soekanto (2002: 243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut pendapat Levinson dalam Soekanto (2004:244) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang dirumuskan oleh Soekanto di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis yang ada dan muncul atas kedudukan atau status yang melekat pada seseorang ataupun lembaga meliputi: norma, individu dalam organisasi, dan perilaku yang penting bagi struktur sosial

Kusnandi (2005:358) mengatakan ada 3 peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu :

1. Peran pribadi (*interpersonal role*) mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu :
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi (*informasi role*) di mana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :

- a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan di luar organisasi yang di anggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara.
3. Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pemimpin memainkan empat peran yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

8. Pengembangan Kepariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata hendaknya tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan kata lain, dalam keadaan nasional itulah hendaknya terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Kementerian kebudayaan dan pariwisata RI menyatakan sebagai visinya bahwa pembangunan kebudayaan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antar negara.

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:

- (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
- (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan

daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3)meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*). Demikian pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.

Soemarwoto (1993: 134) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan kegiatan kompleks, menyangkut wisatawan, kegiatan, sarana prasarana, objek dan daya tarik, fasilitas penunjang, sarana lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus memperhatikan terbinanya mutu lingkungan. Tata letak peruntukan perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara kepentingan pariwisata dengan kepentingan pencagaran. Melalui zonasi yang baik keanekaragaman dapat terpelihara, sehingga wisatawan atau pengunjung dapat memilih rekreasi yang baik.

Pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata Indonesia tersebut. Sedikitnya ada tiga tantangan yang dapat di kemukakan di sini, sebagai berikut:

Pertama, dunia pariwisata Indonesia masih selalu menghadapi tantangan berupa tuntutan dan selera wisatawan dan investor asing di bidang pariwisata yang tidak seiring dengan tujuan menjaga kelestarian unsur-

unsur budaya masyarakat setempat maupun ekologi atau lingkungan alam setempat.

Kedua, masih adanya kenyataan bahwa nilai-tambah ekonomi dari pengembangan pariwisata lebih besar jatuhnya ke tangan investor asing daripada kepada rakyat setempat.

Ketiga, masih adanya pola pikir “searah” yang melandasi hubungan antara pihak “tuan rumah” (pemda dan penduduk) dan pihak “tamu” (wisatawan dan investor), padahal yang seharusnya adalah yang bersifat “timbang-balik”.

9. Konsep Wisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh sorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesatu, sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena sesuatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal Suwanto,2004:3).

Sedangkan menurut Fandeli (2001), wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Dengan demikian pariwisata dapat dibedakan berdasarkan atas objek yang dikunjungi maupun maksud wisatawan mengunjungi daerah tersebut, (Sarwono,2001) yakni:

- a. Wisata budaya adalah keadaan budaya setempat merupakan objek wisata utamanya.
- b. Wisata alam adalah keindahan dan keunikan alam menjadi objek utamanya.
- c. Wisata argo adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang menjadi wisata utamanya.
- d. Wisata wisnu adalah hewan-hewan buruan dalam hutan merupakan objek utamanya.

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam (Anonymous, 1982 dalam Saragih, 1993).

Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut (anonimous).

Menurut James J. Spillane (1994: 63-72) suatu obyek wisata atau destination, harus meliputi lima unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya, maka obyek wisata harus meliputi :

1. *Attractions*

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah :

- a) Keindahan alam
- b) Iklim dan cuaca
- c) Kebudayaan
- d) Sejarah
- e) Ethnicity-sifat kesukuan
- f) Accessibility-kemampuan atau kemudahan berjalan atau ke tempat tertentu.

2. *Facility*

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang. Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut.

3. *Infrastructure*

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah :

a) Sistem pengairan/air

Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan. Seperti penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari.

b) Sumber listrik dan energi

Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (*peak hours*). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus.

c) Jaringan komunikasi

Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, sebagian masih membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau telegram yang tersedia.

d) Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air

Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kira-kira 90 % dari permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan puncak atau permintaan maksimal.

e) Jasa-jasa kesehatan

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal.

f) Jalan-jalan/jalan raya

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan :

1. Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta
2. Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan
3. Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah
4. Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah
5. Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang indah.

4. *Transportation*

Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk :

- a) Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal di tempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal.
- b) Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.
- c) Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandara udara.
- d) Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi di terminal termasuk jadwal dan tarif.
- e) Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.

- f) Tenaga kerja untuk membantu para penumpang.
- g) Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan pengangkutan lokal.
- h) Peta kota harus tersedia bagi penumpang.

5. *Hospitality* (keramahtamahan)

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

Dengan demikian jelaslah bahwa objek wisata merupakan suatu tempat atau kawasan yang memiliki daya tarik, sehingga mendatangkan banyak orang untuk berkunjung dan menikmati suasana di tempat tersebut. Untuk mendukung suatu objek wisata dibutuhkan berbagai sarana prasarana seperti adanya akses menuju ke objek wisata, adanya tempat yang memang tersedia atau disediakan, adanya berbagai sarana pendukung objek wisata, dan masyarakat di sekitar objek wisata yang turut serta berpartisipasi.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah dan penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu materi rujukan maupun pembandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut diambil dari berbagai jurnal ilmu pemerintah berikut ini:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
1.	Amil, Lalu Hendra Maniza, Rio Wahyudi <i>Jurnal Ilmu Administ rasi Publik</i> Vol. 7 No. 2 Septemb er 2019	Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembang an Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat	a. Strategi b. Dampak c. Hambatan	Deskriptif kualitatif	Peran pemerintah Desa Poto Tano terhadap pengembangan objek wisata pulau kenawa dalam membangun ekonomi masyarakat. Bekerjasama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata sumbawa barat dan instansi lain dalam mengadakan event acara Wild West Sumbawa Cruise untuk mempromosikan pulau kenawa. Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Faktor penghambat belum adanya ijin, Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang. Faktor pendukungnya adanya kesadaran dari masyarakat desa
2.	Rotua Kristin Simamor a dan Rudi Salam Sinaga <i>Jurnal Ilmu Pemerint ahan dan Sosial Politik</i> Vol 4	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembang an Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara	a. Fasilitator b. Motivator c. Dinamisator	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian peran Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang

1	2	3	4	5	6
	No. (1) Tahun 2016 Universitas Medan Area				sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.
3	Data Wardan, Zainal dan Arwanto Harimas Ginting Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 10, No. 1, April 2020: 211-219	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Atraksi Aksesibilitas Fasilitas Layanan tambahan Kewenangan lembaga	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kampar pada objek wisata alam Teluk Jering dan hambatan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak ingin objek wisata ini dikelola oleh pemerintah karena ini akan mengurangi pendapatan bagi masyarakat lokal tersebut dan belum adanya kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembangan objek wisata.

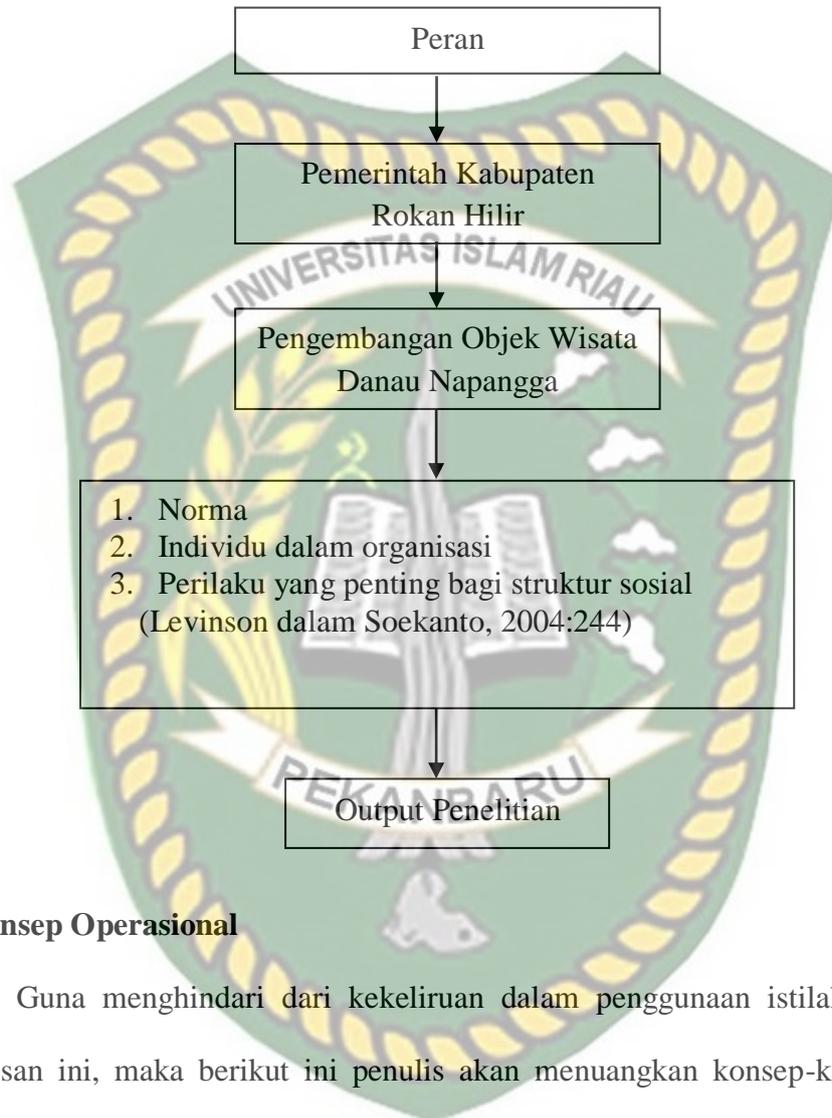
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi atau pedoman pada penelitian ini, maka dapat dipaparkan letak persamaan dan perbedaan yang ada antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Persamaannya dengan penelitian Amil, dkk (2019) terdapat pada pembahasan mengenai peran dari pemerintah desa dan metode penelitian yang digunakan, penelitian dari Simamora (2016) terdapat persamaan mengenai pembahasan tentang pengembangan objek wisata dan metode penelitian yang digunakan. Sementara dari kedua penelitian sebelumnya ini sama-sama terdapat perbedaan pada objek dan waktu penelitian yang berbeda, konsep teori dan indikator yang digunakan berbeda. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu.

C. Kerangka Pikiran

Pengembangan wisata merupakan suatu langkah yang harus ditempuh untuk memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan alam yang dimiliki untuk dijadikan destinasi wisata yang menyenangkan bagi pengunjung. Wisata alam danau Napangga salah satu potensi wisata yang layak dikembangkan karena memiliki potensi alam yang sangat menawan .

Adapun kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui diagram di bawah ini:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan



C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

- a. Peranan adalah suatu usaha atau kemampuan dari orang-orang yang menduduki jabatan untuk dapat menggerakkan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.

- b. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini diwakili pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang melimpahkan kewenangan bidang pariwisata pada Dinas Pariwisata.
- c. Pengembangan adalah pembangunan objek wisata alam untuk dijadikan destinasi wisata sebagai tempat kunjungan masyarakat menikmati suasana alam yang ada.
- d. Wisata Alam adalah obyek dan daya tarik bersumber pada alam, seperti air terjun, sungai, gunung, pemandangan alam dan sebagainya.
- e. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan mengenai pengembangan wisata alam ini adalah :
 1. Norma dalam penelitian merupakan langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menetapkan objek wisata alam potensi, perencanaan pengembangan wisata, dan pelaksanaan pengembangan wisata, serta pembangunan fisik dan non fisik.
 2. Individu dalam organisasi pada penelitian ini adalah konsep kerja yang ditunjukkan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pembangunan fisik dan non fisik, kerja sama, membentuk masyarakat wisata dalam usaha mengembangkan objek wisata yang ada di wilayahnya.
 3. Perilaku yang penting bagi struktur sosial dalam penelitian ini langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk kegiatan promosi dan pendanaan pengembangan objek wisata.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. (Ndraha, 2003:53)	Mengembangkan Objek Wisata	1. Norma	a). Penetapan objek wisata alam potensial b). Perencanaan pengembangan wisata c). Pelaksanaan pengembangan wisata alam d). Pembangunan fisik dan non fisik
		2. Individu dalam organisasi	a). Kerja sama b). Membentuk masyarakat wisata
		3. Perilaku yang penting bagi struktur sosial	a). Kegiatan promosi b). Pendanaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Sebagaimana dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala yang didapatkan.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- a. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana peran dan hambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan. Pendekatan ini berusaha mengungkap

pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

- b. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan rendahnya pengembangan objek wisata yang sudah diperkenalkan dengan baik oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tempat wisata.

C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan informan tambahan.

- a. Informan utama yakni Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
- b. Informan terdiri Penghulu, Anggota BPKep Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan.
- c. Informan tambahan yakni masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan.



D. Teknik Perancangan dan Penetapan Informan

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Informan utama adalah Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan Informan Penghulu, Ketua BPKep, serta informan tambahan yakni masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Penghulu, Ketua BPKep dan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan. Adapun data primer tersebut adalah: identitas informan, indikator penelitian, dan hambatan yang ditemui.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Gambaran Umum Kepenghuluan.
2. Data Pengembangan Wisata
3. Data Pemberdayaan
4. Peraturan-Peraturan yang Mendukung

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014:206) pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk

mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk berupa mencari data sebanyak mungkin dari para informan, terutama informan utama. Peneliti memberikan pertanyaan sedetil mungkin untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.

- b. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan;

keenam, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

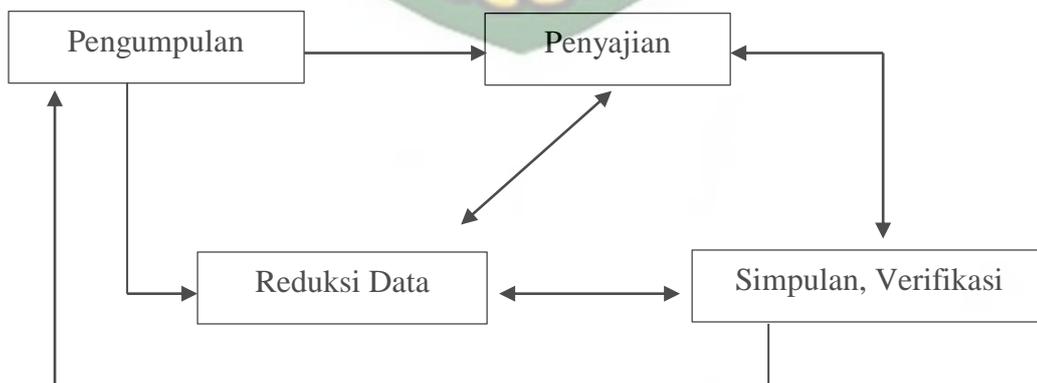
Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles dan Huberman, 2014:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

Pertama, Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

Keempat, Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

J. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Sept-Okt				Nov-Des				Jan-Feb				Mar-Jun				Jul-Agst			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x											
2	Seminar UP										x										
3	Revisi UP										x										
4	Revisi Kuisisioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survey												x	x							
6	Survay Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data													x							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kepenghuluan Tanjung Medan

Kepenghuluan Tanjung Medan lahir sekitar 173 tahun silam. Kata Tanjung Medan di ambil dari dua kata, yaitu Tanjung yang artinya masih ada nampak bentuk tanjung dan Medan adalah sebuah bentuk tanjung untuk lapangan (tempat musyawarah) bagi masyarakat sekitar dalam menyelesaikan permasalahan dan memutuskan sebuah keputusan.

Dahulu, sebelum Tanjung Medan diresmikan sebagai salah satu Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir, Tanjung Medan hanyalah perkampungan yang kecil yang didirikan oleh seorang Panglima Kerajaan yang berasal dari Kerajaan Siak Sri Indra Pura yang bernama Panglima Muda Imbang Jayo. Mulanya Tanjung Medan hanyalah sebuah perkampungan kecil di tepi Danau Napangga.

Kepenghuluan Tanjung Medan yang diresmikan oleh Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 1980 yang saat itu dipimpin oleh (Alm) H. Syahrin Djoehari kini semakin berkembang pesat, bahkan sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan.

B. Keadaan Geografis Kepenghuluan Tanjung Medan

Kepenghuluan Tanjung Medan yang memiliki luas wilayah sekitar $\pm 59,78$ km² merupakan Kepenghuluan yang luas di antara Kepenghuluan yang berada di Kecamatan Tanjung Medan. Batas Kepenghuluan Tanjung Medan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Tanjung Medan Utara

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Sei. Meranti

Sebelah Barat berbatasan dengan Kepenghuluan Kasang Bangsawan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kepenghuluan Angkar belingkar

C. Keadaan Penduduk Kepenghuluan Tanjung Medan

1. Jenis kelamin

Penduduk di Kepenghuluan Tanjung Medan ini berdasarkan dari hasil perhitungan penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Medan berjumlah 4.386 jiwa, jumlah ini berasal dari 1.148 Kepala Keluarga dengan rincian laki-laki (2.227 jiwa) dan perempuan (2.159 jiwa).

Tabel IV.1 Jumlah Masyarakat di Desa Tanjung Medan

No.	Keterangan	Jumlah			Kepala Keluarga	Rata-rata
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Penduduk	2.227	2.159	4.386	1.148	4

2. Pekerjaan

Adapun pekerjaan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan secara terperinci yaitu Pegawai Pemerintahan 74 orang, POLRI 5 orang, Petani 125 orang, Nelayan 83 orang, Pedagang 30 orang, Buruh 23 orang, Bidan 14 orang, Dokter 4 orang, Perawat 11 orang, dan Guru 30 orang.

Tabel IV.2 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	940
2	PNS	74
3	TNI/Polri	7
4	Pedagang	30
5	Buruh	23
6	Tenaga Kesehatan	29
7	Guru	30
8	Wiraswasta	15
Jumlah		1.148

3. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Medan cukup lengkap, hal ini dikarenakan Kepenghuluan ini lebih mengedepankan pendidikan terhadap anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kepenghuluan Tanjung Medan yaitu:

Tabel IV.3 Sarana Pendidikan yang ada di Desa Tanjung Medan

No	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
1.	Paud/TK	-	2
2.	SD/MI	1	1
3.	SMP/MTs	1	1
4.	SMA	1	-

4. Agama

Dengan mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam, maka tidaklah heran bahwa sebagian besar penduduk Kepenghuluan Tanjung Medan menganut agama Islam. Selain ada warga Kepenghuluan Tanjung Medan. Ada beberapa penduduk yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan dengan jumlah yang paling sedikit yakni sebesar 6 Kepala Keluarga dari total 1.148 Kepala Keluarga.

D. Gambaran Danau Napangga

Danau Napangga adalah Danau yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan. Kata Danau Napangga diambil dari hasil rapat oleh 7 Raja yang dipimpin langsung oleh Sultan Siak Sri Indra Pura. Yang mana (6) enam Raja lainnya yaitu:

1. Raja Kota Pinang
2. Raja Negeri Lama
3. Raja Semangambat
4. Raja Dalu-Dalu
5. Raja Rambah
6. Raja Kepenuhan

Kata Danau Napangga sendiri awalnya bernama Laut Danau Napangga, yang memiliki arti tersendiri. Laut artinya tempatan karena danau tersebut luas, Danau artinya Danau berdasarkan bahasa Nasional, sedangkan Napangga diambil dari bahasa Mandailing yang artinya Rawa Kering. Namun setelah disepakati oleh para Raja-raja yang hadir pada waktu itu maka, Laut Danau Napangga yang

terdahulu diganti dengan nama Danau Napangga yang sekarang menjadi ikon Kepenghuluan Tanjung Medan yang kemudian telah menjadi asset wisata Kabupaten Rokan Hilir.

Di Danau Napangga juga hidup ratusan jenis ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan. Danau Napangga yang sampai sekarang masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bergantung hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Danau Napangga tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, Danau Napangga yang dikenal dengan banyak kekayaan alam yang melimpah, kini mulai mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia yang melakukan penebangan pohon dan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. hal ini juga membuat perkembangbiakan ikan yang hidup di Danau Napangga terancam punah karena tidak adanya lagi Hutan Rawa di sekitar danau.

Gambar IV.1 Plang Danau Napangga



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Penelitian menggunakan informan sebagai salah satu sumber data yang dikumpulkan untuk dianalisis. Di mana informan pada penelitian ini berasal dari beberapa kalangan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan objek wisata di Danau Napangga, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang mendalam tentang peran dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan potensi wisata alam yang ada di wilayahnya.

Informan yang dijadikan sumber data dapat dilihat karakteristiknya pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Budiman	57	Laki-laki	S-1	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir
2	Suhendri	49	Laki-laki	SMA	Penghulu Tanjung Medan
3	Syahrudin	63	Laki-laki	SMA	Ketua BPKep Tanjung Medan
4	H. Daner Muhtar	58	Laki-laki	SMA	Tokoh masyarakat Tanjung Medan
5	Hj. Emilda	55	Perempuan	D-3	Tokoh masyarakat Tanjung Medan
6	Sumini	45	Perempuan	SMA	Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir/Ketua Pokdarwis Napangga

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021.

Data informan yang tertuang pada tabel di atas memberikan penjelasan bahwa dari tingkat usia informan berada pada rentang usia 45 – 63 tahun, sehingga dengan rentang usia yang dimiliki informan mampu memahami dan memberikan pengalamannya dalam menangani permasalahan yang diteliti. Karakteristik jenis kelamin informan penelitian ini telah terwakili dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sementara dari tingkatan pendidikan informan berada pada tingkatan pendidikan SMA sampai Strata Satu (S-1). Sedangkan dari jenis pekerjaan, semua informan berkenaan dan bersentuhan langsung dengan permasalahan yang diteliti yakni Dinas Pariwisata, Penghulu, Ketua BPKep, tokoh masyarakat, dan Ketua Pokdarwis.

B. Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan

Peran memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Beragam peran menyertai dari setiap lini kehidupan manusia, begitu juga dengan peran yang menyertai pada pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat beragam dalam tatanan berbangsa dan bernegara, yang mana salah satu peran dari pemerintah sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan adalah bidang pariwisata.

Bidang pariwisata memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian di suatu daerah, sehingga keberadaan objek wisata sudah selayaknya dikembangkan dan diperhatikan sebagai salah satu sumber daya yang memiliki potensi dalam mengeruk dan mengumpulkan sumber pendapatan daerah. Sampai saat ini bidang pariwisata merupakan bidang yang menjanjikan dalam

peningkatan perekonomian baik sebagai sumber pendapatan daerah maupun sumber-sumber perekonomian bagi masyarakat.

Begitu juga dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, daerah ini terdapat salah satu potensi objek wisata alam yang sangat baik untuk dikembangkan dan dimajukan. Selain dikarenakan potensi alam yang menarik dan memiliki ciri khas yang unik, pengembangan objek wisata juga bisa memberikan sumber pendapatan baru dan bisa menggerakkan roda perekonomian di masyarakat.

Objek wisata alam Danau Napangga yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam upaya mendukung pengembangannya beragam kegiatan dan program telah dijalankan pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah desa serta kelompok sadar wisata yang telah dibentuk. Upaya pengembangan yang telah dijalani ini harus bersifat kontinu dan saling mendukung, sehingga terwujudlah objek wisata yang pantas dan layak untuk dikunjungi masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti telah memfokuskan pada peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan. Untuk menjawab peranan tersebut telah ditetapkan 3 indikator sebagai tolak ukur dari peran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yakni norma, individu dalam organisasi, perilaku yang penting bagi struktur sosial.

Adapun penjelasan dan uraian dari masing-masing indikator penelitian yang telah ditetapkan dapat dijabarkan dalam analisis berikut ini:

1. Norma

Norma adalah kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang berada di bawahnya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah adalah mengembangkan dan menggali potensi sumber daya yang ada di daerah salah satu bentuknya adalah bidang pariwisata.

a). Penetapan objek wisata alam potensial

Objek wisata Danau Napangga ditetapkan sebagai salah satu objek wisata unggulan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini tidak terlepas dari semakin maraknya pengembangan-pengembangan bidang pariwisata dari berbagai daerah, sehingga dengan potensi-potensi yang ada maka Danau Napangga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Penetapan objek wisata Danau Napangga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan tentunya merupakan keuntungan bagi pemerintah daerah. Di mana dengan ditetapkannya objek wisata, tentu pemerintah daerah bisa berkontribusi lebih besar dalam mengembangkannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerah.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Danau Napangga terletak di kawasan pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Medan, maka dari itu kita selaku pihak kepenghuluan berkewajiban untuk memajukan potensi wisata yang ada di daerah kita tersebut (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa Danau Napangga ditetapkan sebagai salah satu kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan adanya potensi alam yang terdapat di kawasan tersebut. Di mana Danau Napangga memiliki keunikan dari segi bentuk dan letak yang membelah dua aliran air yang bermuara ke sungai Rokan.

Wawancara dengan Bapak Saharuddin selaku ketua BPKep Kepenghuluan Tanjung Medang berikut ini:

Salah satu landasannya adalah untuk memajukan wisata itu sendiri dan menambah pendapatan masyarakat tidak terkelola dengan baik. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Penetapan kawasan objek wisata Danau Napangga dikarenakan adanya potensi yang dimiliki kawasan ini. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat salah satu upayanya adalah dengan menggali potensi wisata yang ada, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di penghuluan Tanjung Medan.

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Salah satu alasannya adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan objek-objek wisata yang potensial. Hambatan dalam anggaran pengembangan yang terbatas. (Wawancara pada tanggal 08 Juni 2021)

Adanya kewajiban dari pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya, menjadi salah satu landasan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Danau Napangga sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Adanya perintah perundang-undangan ini membuka peluang bagi daerah dalam menggali potensi wisata dan

mengembangkannya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat di sekitar kawasan objek wisata.

Wawancara dengan Bapak H. Daner Muhtar selaku tokoh masyarakat Tanjung Medan berikut:

Selain alamnya yang masih asli belum pernah tersentuh, maka dari itu perlu sekiranya kita sebagai masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa kita. (Wawancara pada tanggal 09 Juni 2021)

Keaslian dari Danau Napangga yang masih terjaga habitatnya menjadi landasan untuk dijadikan objek wisata. Di mana keaslian dari habitat yang masih ada membuat Danau Napangga dianggap layak untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan potensi-potensi yang terdapat di dalamnya.

Wawancara dengan Hj. Emilda selaku tokoh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan diketahui bahwa:

Selain alamnya bagus, juga terdapat potensi wisata yang wajib untuk dikembangkan. (Wawancara pada tanggal 09 Juni 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Danau Napangga memiliki potensi alam yang bagus, sehingga layak untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Rokan hilir yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan. Adanya potensi tersebut sudah sepantasnya mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk dikembangkan lebih jauh lagi agar menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Rokan Hilir.

Wawancara dengan Sumini selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pokdarwis Napangga diperoleh informasi:

Kita melihat ada potensi besar yang terdapat di kawasan Danau Napangga, sehingga kita mengajak masyarakat sekitar untuk sadar akan potensi alam Danau Napangga yang begitu indah ini. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Besarnya potensi yang terdapat di Danau Napangga, sehingga pantas untuk dijadikan salah satu objek wisata dengan berbagai keunggulan yang ada di dalamnya. Di mana Danau Napangga memiliki kelebihan dari segi alam yang masih asli dan habitatnya masih terjaga, selain itu dengan dijadikan objek wisata bisa memberikan kesempatan perekonomian baru bagi masyarakat di sekitarnya.

Hasil pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat bahwa Danau Napangga merupakan Danau Air Tawar yang berada di tengah-tengah Kecamatan Tanjung Medan dan keaslian habitatnya masih terjaga dengan baik, sehingga dengan habitat yang masih terjaga dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk mencari ikan dan juga beternak ikan. Danau Napangga memiliki berbagai kelebihan yang pantas untuk dijadikan objek wisata, saat ini Danau Napangga memiliki pemandangan yang indah bila dilihat pada sore hari dan bisa terlihat dari berbagai titik.

Dengan demikian penetapan kawasan objek wisata Danau Napangga ditetapkan karena potensi yang masih asli dengan habitat yang terjaga menjadi faktor utama ditetapkannya sebagai salah satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Adanya landasan ini menjadi faktor utama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Danau Napangga menjadi objek wisata yang ada di Kepenghuluan Tanjung Medan, sehingga objek wisata Danau Napangga layak dijadikan objek wisata unggulan.

b) Perencanaan pengembangan wisata

Pengembangan objek wisata tidak terlepas dari perencanaan yang harus mengiringinya. Di mana perencanaan pengembangan wisata menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas objek wisata dan memberikan peluang untuk terus berkembang. Perencanaan pengembangan wisata menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan, agar objek wisata yang telah ditetapkan menjadi semakin menarik.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Kalau masalah rencana pengembangan kita terlalu banyak untuk pengembangan kawasan Danau Napangga ini, salah satunya adalah membangun sarana dan prasarana penunjang untuk memuaskan wisatawan, akan tetapi dikarenakan kita memang mempunyai keterbatasan dana. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Perencanaan pengembangan objek Wisata Danau Napangga yang direncanakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Tanjung Medan adalah dengan membangun sarana prasarana pendukung untuk memberikan kepuasan kepada pengunjung. Selain itu pemerintah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Kepenghuluan Tanjung Medan bersama masyarakat telah membentuk Pokdarwis sebagai pengelola objek wisata, sehingga Danau Napangga bisa menjadi objek wisata yang layak untuk dikunjungi sebagaimana diharapkan.

Wawancara dengan Bapak Saharuddin selaku ketua BPKep Kepenghuluan Tanjung Medang berikut ini:

Sudah berkali-kali diusulkan ke pihak Kepenghuluan melalui Musrenbang Kepenghuluan dan Musrenbang Kecamatan. Namun belum ada tindak

lanjut oleh pemerintah Kepenghuluan. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Berbagai perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kepenghuluan dalam mengembangkan objek wisata. Tetapi berbagai perencanaan tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kepenghuluan, sehingga membutuhkan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan objek wisata Danau Napangga yang salah satunya adalah dengan mengusulkan berbagai program pembangunan pemerintahan daerah melalui Musrenbang.

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Even Danau Napangga telah masuk ke kalender Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk tahun anggaran 2021 dialihkan ke dana penanganan Covid-19 dan Insha Allah setelah Covid-19 pulih kita akan kembalikan even Napangga kembali. (Wawancara pada tanggal 08 Juni 2021)

Perencanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menetapkan even tahunan sebagai pendukung dalam mempromosikan objek wisata ke masyarakat luas. Di mana setiap tahunnya telah diagendakan Danau Napangga sebagai salah satu objek wisata yang mendapatkan prioritas untuk diadakan even tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata Kabupaten Rokan Hilir.

Wawancara dengan Bapak H. Daner Muhtar selaku tokoh masyarakat Tanjung Medan berikut:

Salah satu rencana yang telah ditetapkan adalah kawasan sekitarnya Danau Napangga sebagai aset desa yang telah disepakati oleh ninik mamak atau pemuka suku di Desa Tanjung Medan. (Wawancara pada tanggal 09 Juni 2021)

Perencanaan pengembangan Danau Napangga dari masyarakat dan pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan serta pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan kepastian status dari danau tersebut. Di mana Danau Napangga telah disepakati menjadi aset Kepenghuluan, sehingga dengan menjadi aset kepenghuluan ini bisa memudahkan untuk dilaksanakan berbagai pembangunan fisik dan juga melimpahkan pengelolaan atas objek wisata.

Wawancara dengan Sumini selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pokdarwis Napangga diperoleh informasi:

Kita berencana untuk membuat spot-spot foto bagi para pengunjung wisata Danau Napangga. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Berbagai perencanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga telah ditetapkan. Di mana salah satunya adalah dengan melakukan berbagai pembangunan sarana prasarana pendukung, sehingga memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk menikmati keindahan alam Danau Napangga dengan membuat spot-spot foto di berbagai titik. Namun saat ini dengan berbagai permasalahan yang ada, perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya dana yang tersedia baik dari pemerintah Kepenghuluan maupun dari Pemerintah Kabupaten karena difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan ditemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah ditetapkan berbagai rencana untuk pengembangan kawasan objek wisata Danau Napangga oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Tanjung Medan yakni salah satunya adalah membuat jalan dan turap ditepian danau. Namun pada tahun 2020 dan 2021 ini tidak bisa

direalisasikan dikarenakan anggaran yang dimiliki sebagian besar dialokasikan untuk penanganan Covid-19, sehingga saat ini objek wisata Danau Napangga menjadi seperti terbiarkan dan terbengkalai tanpa dikelola dengan baik semua aset yang telah ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah ada perencanaan yang ditetapkan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Tanjung Medan dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga. Tetapi dengan berbagai kendala yang dihadapi, seluruh rencana belum bisa direalisasikan, sehingga keadaan objek wisata Danau Napangga seperti terbiarkan.

c). Pelaksanaan pengembangan wisata alam

Pelaksanaan pengembangan wisata alam merupakan salah upaya yang bisa dilakukan dalam menggali berbagai potensi wisata. Di mana pada penelitian ini wisata alam Danau Napangga sangat layak telah ditetapkan sebagai salah satu objek wisata unggulan dan dengan itu layak untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Kita telah usulkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir untuk memasukan even Danau Napangga ke kalender tahunan Pemerintah Rokan Hilir. Alhamdulillah Dana Napangga sekarang memiliki even tahunan yang diselenggarakan oleh Pemda dan Pemerintah Kepenghuluan beserta pihak terkait. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Pelaksanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan dengan mengadakan berbagai even tahunan. Di mana setiap tahunnya telah ditetapkan even Danau Napangga dengan

menghadirkan berbagai perlombaan dan mendatangkan artis-artis ibukota sebagai pendukung kegiatan. Pelaksanaan pengembangan objek wisata ini sebagian besarnya adalah kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kepenghuluan.

Wawancara dengan Bapak Saharuddin selaku ketua BPKep Kepenghuluan Tanjung Medang berikut ini:

Membersihkan kewajiban yang sering dikunjungi dan menyediakan tempat masyarakat berdagang. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Pelaksanaan pengembangan yang harus diperhatikan adalah dengan mengadakan berbagai program untuk mendukung objek wisata. Salah satu program yang harus dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan Danau Napangga dan kawasan di sekitarnya, sehingga wisatawan menjadi nyaman dan objek wisata menjadi pantas untuk dikunjungi.

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Salah satu langkahnya adalah dengan membangun bola-bola hias di tepian Danau Napangga, dana berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017. Hambatannya adalah tidak terjaganya sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. (Wawancara pada tanggal 08 Juni 2021)

Berbagai program yang dilaksanakan untuk pengembangan objek wisata dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan. Salah satu langkahnya adalah dengan membangun bola-bola hias di tepian Danau Napangga, dana berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017. Hambatannya adalah tidak terjaganya sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Wawancara dengan Sumini selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pokdarwis Napangga diperoleh informasi:

Salah satu langkah kita untuk mengembangkan kawasan Danau Napangga dengan memposting kawasan Danau Napangga ke media-media sosial, cetak, maupun media elektronik (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Pelaksanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga yang terus dilakukan oleh penggiat wisata yakni Pokdarwis adalah dengan mempromosikan objek wisata ke masyarakat luas. Namun pelaksanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga dalam hal fisik belum terlihat, sehingga pembangunan yang telah ada menjadi rusak dan tidak terpelihara.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti perhatikan terlihat bahwa pelaksanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga telah dilakukan dengan membangun jalan menuju kawasan, rumah rimba, dan tempat-tempat spot foto para pengunjung, serta lainnya. Namun beberapa bangunan yang telah ada terbiarkan, sehingga keadaannya seperti tidak terawat dan berbagai jenis bangunan seperti rumah rimba terlihat lapuk tanpa perawatan. Dengan demikian keindahan objek wisata Danau Napangga saat ini tidak lagi dapat dinikmati dengan baik oleh pengunjung yang datang, dikarenakan kurangnya pelaksanaan pengembangan yang dilakukan dan pembangunan-pembangunan atas pengelolaan Danau Napangga hanya berharap banyak dari anggaran kepenghuluan maupun dari alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten.

Dengan demikian dari segi pelaksanaan pengembangan objek wisata Danau Napangga pernah dilakukan. Namun kondisi saat ini sudah tidak ideal lagi dan terbiarkan tanpa dikelola dengan baik. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan

pengembangan Danau Napangga belum serius dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Tanjung Medan, sehingga potensi besar yang ada pada Danau Napangga tidak termanfaatkan dengan baik.

d). Pembangunan fisik dan non fisik

Pembangunan fisik dan non fisik menjadi bagian penting untuk diperhatikan dalam pengembangan objek wisata. Begitu juga pengembangan objek wisata Danau Napangga yang membutuhkan sentuhan pembangunan fisik dan non fisik dari pemerintah yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Kepenghuluan Tanjung Medan.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Salah satu sarana yang paling penting yang kita bangun yaitu akses jalan menuju Danau Napangga dan rumah rimba Danau Napangga. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan dalam mengembangkan objek wisata adalah dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana penunjang yakni berupa membangun akses jalan menuju objek wisata. Sementara dari segi pembangunan non fisik telah ditetapkannya objek wisata Danau Napangga sebagai aset kepenghuluan dan telah dibentuknya kelompok masyarakat sebagai pengelola objek wisata yakni Pokdarwis Napangga.

Wawancara dengan Bapak Saharuddin selaku ketua BPKep Kepenghuluan Tanjung Medang berikut ini:

Jalan menuju Danau Napangga dan pembangunan Rumah Rimba kurang perawatan oleh pengelola. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Pembangunan yang paling utama untuk dilakukan adalah pembangunan fisik sebagai pendukung dari akses menuju objek wisata. Di mana pembangunan jalan menjadi hal utama yang harus dilakukan dan sarana pendukung lainnya, sehingga dalam beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan pembangunan jalan menuju objek wisata dan pembangunan rumah rimba dengan memanfaatkan material yang berasal dari sekitaran Danau Napangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Untuk saat ini di Danau Napangga Cuma ada pembangunan rumah rimba dan spott foto bagi para pengunjung, dikarenakan dana terbatas maka pemerintah membangun tidak dalam bentuk bangunan permanen, akan tetapi memanfaatkan kayu-kayu yang ada disekitaran Danau Napangga untuk dijadikan bahan bangunan, sehingga mudah lapuk. (Wawancara pada tanggal 08 Juni 2021)

Pembangunan yang penting untuk mendukung objek wisata Danau Napangga adalah sarana prasaran pendukung yang menjadi bagian dari memperkenalkan objek wisata. Untuk saat ini di Danau Napangga Cuma ada pembangunan rumah rimba dan spott foto bagi para pengunjung, dikarenakan dana terbatas maka pemerintah membangun tidak dalam bentuk bangunan permanen, akan tetapi memanfaatkan kayu-kayu yang ada disekitaran Danau Napangga untuk dijadikan bahan bangunan, sehingga mudah lapuk.

Hasil pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat telah ada akses jalan yang dibangun menuju objek wisata, walaupun belum sampai ke titik yang hendak dituju. Kemudian ada beberapa bangunan yang telah di bangunan untuk mendukung objek wisata seperti rumah rimba, titik atau tempat-tempat berfoto. Mudahnya melakukan pembangunan tidak diiringi dengan perawatan,

sehingga saat ini beberapa rumah rimba dan tempat berfoto yang telah dibangun menjadi lapuk dan tidak terawat menjadi tempat-tempat ini tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh pengunjung.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pembangunan fisik dan non fisik telah dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Di mana pada pembangunan fisik telah dibangun jalan semenisasi menuju Danau Napangga, adanya pembangunan rumah rimba dan tempat-tempat berfoto. Sementara dari segi pembangunan non fisik telah dibentuknya pengelola dari objek wisata Danau Napangga yakni Pokdarwis Napangga.

Temuan dari indikator norma yakni telah ditetapkan Danau Napangga sebagai destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Telah ada berbagai perencanaan pengembangan dan pelaksanaan pengembangan yang dilakukan baik dalam bentuk kegiatan berupa even maupun dalam bentuk pembangunan fisik jalan, rumah rimba, dan tempat berfoto. Kemudian dari segi non fisik telah dibentuknya Pokdarwis sebagai penggerak wisata Danau Napangga dan menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya wisata. Sementara

Dengan demikian, dari indikator Norma telah ada peran dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal kewenangan mengembangkan objek Wisata Danau Napangga. Namun saat ini semua bentuk perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tidak lagi berjalan sebagaimana diharapkan, dikarenakan adanya ketergantungan atas anggaran dari pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Individu Dalam Organisasi

Individu dalam organisasi adalah konsep yang melekat pada seorang kepemimpinan dalam memimpin pemerintahan bidang pariwisata yakni Kepala Dinas Pariwisata. Di mana kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mendukung peran dalam setiap organisasi maupun kelompok. Kepemimpinan bisa berupa orang yang memimpin dan juga bisa berupa kebijakan pemimpin atas organisasi yang dipimpinnya. Pada penelitian ini konsep tentang apa yang dapat dilakukan dilihat dari peran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga.

a). Kerja sama

Kerjasama adalah adanya kesepakatan bersama untuk menjalankan berbagai hal atau pekerjaan yang dijalani. Kerja sama dalam penelitian ini adalah kerja sama yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Salah satunya adalah even tahunan yang diadakan di Danau Napangga terlaksana atas kerja sama pihak Pemda dan Pemerintah Kepenghuluan.

Untuk mengembangkan objek wisata Danau Napangga, pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata untuk bersama-sama mengembangkan objek wisata Danau Napangga. Hasil dari kerja sama tersebut terciptanya even tahunan Danau Napangga yang masuk dalam kalender pariwisata Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Bentuk kerjasamanya adalah apabila even Danau Napangga dengan pihak-pihak terkait seperti Pokdarwis Napangga dan masyarakat setempat. (Wawancara pada tanggal 08 Juni 2021)

Bentuk kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah mengadakan even atau kegiatan tahunan dalam rangka mempromosikan Danau Napangga sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu kerja sama yang terbangun juga dengan membentuk Pokdarwis sebagai penggerak pariwisata di tingkat kepenghuluan.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat dalam hal hubungan kerja sama telah adanya kerja sama antara pemerintah kepenghuluan dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Dinas Pariwisata dan juga dengan Pokdarwis dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga. Di mana bentuk kerja sama yang tercipta adanya dalam hal mengadakan berbagai even dan mempromosikan Danau Napangga ke masyarakat luas.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata telah berperan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain pada upaya mengembangkan objek wisata Danau Napangga.

b). Membentuk masyarakat wisata

Membentuk masyarakat wisata merupakan langkah yang harus digalakkan dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi wisata yang telah ada. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengelolaan maupun

lainnya dalam mengembangkan wisata. Untuk itu membentuk masyarakat wisata merupakan hal yang paling efektif dalam mengembangkan berbagai destinasi objek wisata yang ada.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Langkah-langkah Pokdarwis Napangga adalah menghimbau kepada masyarakat agar sadar betapa besarnya potensi wisata Danau Napangga melalui media-media sosial. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata adalah dengan membentuk Pokdarwis selaku penggerak wisata di masyarakat. Di mana Pokdarwis bertugas mengelola dan mengajak masyarakat akan pentingnya wisata dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga objek wisata yang ada bisa terkelola dan memberikan sumber-sumber perekonomian baru bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hilir cuma memberi bimbingan baik teknis maupun teori kepada Pokdarwis yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, termasuk Pokdarwis Napangga. (Wawancara pada tanggal 08 Juni 2021)

Dalam upaya membentuk masyarakat sadar wisata pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mengadakan berbagai kegiatan yakni memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Pokdarwis yang ada, sehingga Pokdarwis-Pokdarwis memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola dan menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya wisata.

Wawancara dengan Sumini selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pokdarwis Napangga diperoleh informasi:

Program Pokdarwis Napangga adalah untuk mengajak masyarakat khususnya masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Medan untuk bersama-sama mengembangkan kawasan Danau Napangga sehingga menambah daya ekonomi masyarakat sekitar. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Pokdarwis Napangga sebagai salah satu ujung tombak dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga memiliki tugas untuk mengajak masyarakat sadar akan wisata. Di mana wisata bisa memberikan dampak yang positif dalam pembukaan perekonomian baru bagi masyarakat, sehingga dengan bersama-sama dalam mengelola dan menata objek wisata Danau Napangga dengan baik akan mampu menghadirkan masyarakat luas untuk berkunjung.

Hasil pengamatan lapangan yang peneliti perhatikan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata telah membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai bentuk untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya wisata. Namun di lapangan terlihat kelompok yang telah dibentuk belum mampu memainkan perannya dalam mengelola dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola objek wisata Danau Napangga, sehingga objek wisata Danau Napangga tidak terkelola sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam usaha mengembangkan kesadaran masyarakat akan bidang wisata telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Namun hasil dari usaha ini belum terlihat dari segi pengelolaan dan kesadaran masyarakat yang ada di sekitar objek wisata Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan.

Temuan hasil penelitian tentang indikator individu dalam organisasi ini terlihat bahwa telah ada langkah-langkah pengembangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga, seperti dari kerja sama telah terjalin dengan baik bersama Dinas Pariwisata, sehingga setiap tahunnya telah ditetapkan Danau Napangga menjadi salah satu even yang masuk kalender pariwisata Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian peran kepemimpinan telah dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui pelimpahan kewenangan kepada Dinas Pariwisata.

3. Perilaku yang Penting bagi Struktur Sosial

Perilaku yang penting bagi struktur sosial dalam penelitian ini langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk kegiatan promosi dan pendanaan pengembangan objek wisata. Di mana dengan langkah ini peneliti dapat melihat peran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga.

a) Kegiatan promosi

Kegiatan promosi menjadi penting untuk terus digalakan dalam mengingat dan memperkenalkan secara terus menerus kepada masyarakat mengenai keberadaan objek wisata Danau Napangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Salah satunya ya even tahunan Danau Napangga. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam upaya mengembangkan potensi wisata di Danau Napangga telah diadakan even atau kegiatan tahunan yang memfokuskan titik objeknya Danau Napangga. Kegiatan tahunan ini khususnya dalam rangka memperkenalkan dan mengingatkan kepada wisatawan keberadaan objek wisata Danau Napangga

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Lomba sampan hias, kuda lumping, spot foto, membuat akun media sosial Danau Napangga. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Berbagai kegiatan di atas dalam even tahunan Danau Napangga seperti lomba sampan hias, kuda lumping, sport foto, dan membuat akun media sosial. Melalui berbagai langkah kegiatan dan promosi ini mampu meningkatkan kehadiran pengunjung untuk menikmati suasana berwisata di Danau Napangga

Wawancara dengan Sumini selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pokdarwis Napangga diperoleh informasi:

Kalau Pokdarwis Cuma berfokus kepada memperkenalkan Danau Napangga melalui media-media sosial maupun media cetak. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa telah adalah upaya promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana secara langsung pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir mengadakan even tahunan Danau Napangga. Secara tidak langsung terlibatnya Pokdarwis dalam mempromosikan Danau Napangga secara langsung

maupun melalui media komunikasi untuk memperkenalkan dan mengingat pengunjung tentang objek wisata Danau Napangga.

Gambar V.1 Promosi Danau Napangga Melalui Media Sosial Instagram dan Facebook



Dengan demikian beragam kegiatan promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan Danau Napangga sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan dengan menetapkan agenda tahunan berupa even Danau Napangga dengan mengadakan berbagai kegiatan. Sementara dari Pokdarwis yang telah dibentuk senantiasa mempromosikan Danau Napangga

melalui beragam media sosial maupun media cetak, hal ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat luas dan memberikan informasi bahwa Danau Napangga adalah objek wisata yang pantas untuk dikunjungi.

Hasil pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, kegiatan promosi atas Danau Napangga tidak dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Pariwisata, maupun Pokdarwis. Promosi baru muncul beberapa waktu menjelang akan diadakannya kegiatan atau even Danau Napangga dan setelah even selesai. Hal ini tentunya tidak efektif dalam mengingatkan dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai keberadaan Danau Napangga.

b). Pendanaan

Pendanaan sangat penting dalam berbagai hal atau kegiatan. Begitu juga dengan dalam mengembangkan objek wisata, sehingga pendanaan menjadi sumber penting yang menjadi perhatian serius agar bisa mewujudkan berbagai program pengembangan objek wisata.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendri selaku Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan diperoleh informasi berikut:

Dari APBD Rohil beserta pihak ketiga. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir yakni

Dari APBD Provinsi Riau dan gabungan APBD Rohil beserta pihak ketiga. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Wawancara dengan Sumini selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pokdarwis Napangga diperoleh informasi:

Dari APBD Rohil dan dari pihak donatur (perusahaan). (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para informan di atas terlihat bahwa sumber dana dari pengembangan objek wisata Danau Napangga seluruhnya berharap dari pemerintah baik dari pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan maupun dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa perilaku yang penting bagi struktur sosial dalam pengembangan objek wisata Danau Napangga telah menetapkan berbagai jenis kegiatan untuk mempromosikan dan sumber pendanaan paling utama berasal dari pemerintah. Melalui kegiatan promosi yang terus menerus dan kegiatan-kegiatan yang pendanaannya dari pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan untuk terus berkunjung ke Danau Napangga.

Dengan demikian dari analisis hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan yang dilihat dari 3 indikator yakni norma, individu dalam organisasi, dan perilaku yang penting bagi struktur sosial secara keseluruhan telah cukup berperan. Di mana pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan kawasan objek wisata Danau Napangga sebagai salah satu aset pemerintah, kemudian untuk mengelolanya dibentuk kelompok masyarakat yang konsen terhadap bidang pariwisata yakni Pokdarwis Napangga. Dalam mendukung objek wisata ini telah dibangun beberapa jenis bangunan seperti jalan menuju danau, rumah rimba, dan tempat-tempat swafoto. Dalam upaya mengembangkan objek wisata telah terjalin kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata dengan Kepenghuluan Tanjung

Medan, sehingga terwujudnya salah satu agenda tahunan berupa even Danau Napangga.

Peranan-peranan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata tidak diiringi dengan keseriusan dalam pengelolaannya, sehingga berbagai jenis bangunan yang telah dibangun tidak lagi bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsi awalnya. Kemudian kurang efektifnya Pokdarwis dalam mengelola objek wisata dan menggalak masyarakat untuk turut serta peduli akan wisata, sehingga objek wisata Danau Napangga yang memiliki potensi cukup baik ini tidak berkembang dengan baik dan kunjungi masyarakat hanya pada saat adanya even tahunan Danau Napangga.

C. Hambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan.

Hasil penelitian ini terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pengembangan objek wisata Danau Napangga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

1. Norma

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata belum ada mengalokasikan anggaran dana untuk operasional pengelola Danau Napangga, sehingga objek wisata ini menjadi terbengkalai dan tidak terurus sebagaimana yang diharapkan. Padahal dalam mengelola dan merawat semua bangunan fisik yang ada dibutuhkan dana, yang tentunya bila berharap dari pengunjung yang belum begitu ramai tidak mungkin dapat diperoleh biaya perawatan-perawatan bangunan yang ada.

2. Individu dalam organisasi

Kurang inovasinya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata dalam menggalakkan masyarakat untuk sadar akan bidang wisata. Padahal di berbagai daerah lain bidang wisata mampu memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakatnya.

3. Perilaku yang penting bagi struktur sosial

Promosi-promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan dan mengingatkan masyarakat akan keberadaan Danau Napangga tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga keberadaan Danau Napangga hanya dikunjungi masyarakat pada saat ada even tahunan saja dan hari-hari lainnya terlupakan sebagai salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Napangga Tanjung Medan yang dilihat dari 3 indikator secara keseluruhan telah cukup berperan. *Pertama*, norma terlihat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan kawasan objek wisata Danau Napangga sebagai salah satu aset pemerintah, kemudian telah dibangun beberapa jenis bangunan seperti jalan menuju danau, rumah rimba, dan tempat-tempat swafoto, selanjutnya untuk mengelolanya dibentuk kelompok masyarakat yang konsen atau fokus terhadap bidang pariwisata yakni Pokdarwis Napangga. *Kedua*, individu dalam organisasi terlihat telah terjalin kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pariwisata dengan pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan, sehingga terwujudnya salah satu agenda tahunan berupa even Danau Napangga. *Ketiga*, perilaku yang penting bagi struktur sosial terlihat dalam upaya mengembangkan objek wisata Danau Napangga telah ada kegiatan promosi yang dilakukan baik itu pemerintah Dinas Pariwisata, pokdarwis, maupun pemerintah kepenghuluan. Sementara untuk pendanaan setiap kegiatan tahunan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Adanya beberapa hambatan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata Danau Napangga yakni terbatasnya alokasi

anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata untuk pengembangan wisata, kurangnya inovasi Pokdarwis yang telah dibentuk pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata, kurangnya promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan dan mengingatkan masyarakat akan keberadaan Danau Napangga.

B. Saran-saran

Hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti ingin memberikan saran untuk perbaikan pada masa mendatang dalam pengembangan objek wisata, yakni:

1. Hendaknya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui instansi yang berwenang di bidang pariwisata dan pembangunan bersama-sama dalam mendukung pengembangan wisata dengan cara membangun sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan.
2. Hendaknya Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan dana tahunan untuk pengelolaan objek wisata, sehingga pengelola objek wisata bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dananya.
3. Hendaknya ada alokasi anggaran yang diperuntukkan oleh Kepenghuluan Tanjung Medan pada pengembangan objek wisata Danau Napangga baik itu dalam bentuk operasional pengelola maupun pembangunan.
4. Hendaknya Pokdarwis yang ada terus berinovasi dalam mengembangkan dan memperkenalkan objek wisata Danau Napangga. Kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan objek wisata dengan mengedepankan potensi-potensi yang ada seperti menggalak masyarakat menyediakan pangan khas wilayah tersebut dan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy, Supriadi Beratakusumah. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Editor Sri Maulidiah. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Siagian, Sondang. P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono, AG., 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Brilian.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar Dasar Pariwisata*. Yogyakarta. ANDI

Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi “Skematika, Teori, dan Terapan”*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. dan Edwards, George. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kerjasama Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wardana, Data. Zainal dan Arwanto Harimas Ginting. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Vol. 10 No. 1 Tahun 2020.

Widjaja, Haw. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945